



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh
Kartika Ayu Kushardiyanti
NIM 120910201087

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Kartika Ayu Kushardiyanti
NIM 120910201087

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan dengan kerendahan hati, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas pertolongan-Nya sehingga sebetuk karya kecil yang penuh dengan pengorbanan dan iringan doa yang tulus dari orang-orang terkasih dapat terselesaikan. Dengan ridho Allah SWT, berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. kedua orang tua saya, Ayahanda Didiek Harijadi dan Ibunda Sugeng Sumilih Masaganti yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, serta kesabaran dan doa selama ini;
2. adik-adik saya Dinar Aghnia Nadhirah, Muhammad Dimas Ramadhan yang telah memberikan motivasi dan bantuan yang luar biasa untuk menuntaskan skripsi ini;
3. guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. UKMF Wisma Gita FISIP Universitas Jember atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.

MOTTO

“Hendaklah engkau bersemangat terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan pada Allah, dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan “seandainya aku melakukan, niscaya terjadi ini dan itu”. Tetapi katakanlah “ini adalah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan”. Sesungguhnya kata “seandainya” akan membuka perbuatan syaitan.”¹

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya pada Rabb-mulah hendaknya kamu berharap.”²

¹HR. MUSLIM NO. 2664

²QS. AL INSYIRAH AYAT 5 - 8

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Kartika Ayu Kushardiyanti

NIM : 120910201087

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2019
Yang menyatakan,

Kartika Ayu Kushardiyanti
NIM 120910201087

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG
KABUPATEN JEMBER**

*IMPLEMENTATION OF HOPE FAMILY PROGRAM (PKH) IN
PANCAKARYA VILLAGE KECAMATAN AJUNG DISTRICT
JEMBER REGENCY*

Oleh

**Kartika Ayu Kushardiyanti
NIM 120910201087**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA PANCAKARYA KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER ” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat , 26 Juli 2019

tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Boediono, M.Si
NIP 196103311989021001

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D
NIP 196102131988021001

Anggota Penguji,

1. Dr. Sutomo, M.Si (.....)
NIP 196503121991031003
2. Drs, A. Kholiq Azhari, M.Si (.....)
NIP 195607261989021001
3. Nian Riawati, S.Sos, MPA (.....)
NIP 198506092015042002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr.Hadi Prayitno, M.kes
NIP 196106081988021001

PRAKATA

Segala syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Di Kantor Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sutomo M.Si, selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 serta Drs. Kholiq Azhari M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Dr. Sutomo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua selama menjalani studi perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Seluruh Aparat Desa Pancakarya yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam menjadi media pembelajaran dan penelitian.
8. Teman-teman dan sahabat saya yang telah membantu, saling berbagi pemikiran, dan motivasi serta semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sesuai dari-Nya. Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 28 Juni 2019

Penulis

Kartika Ayu K

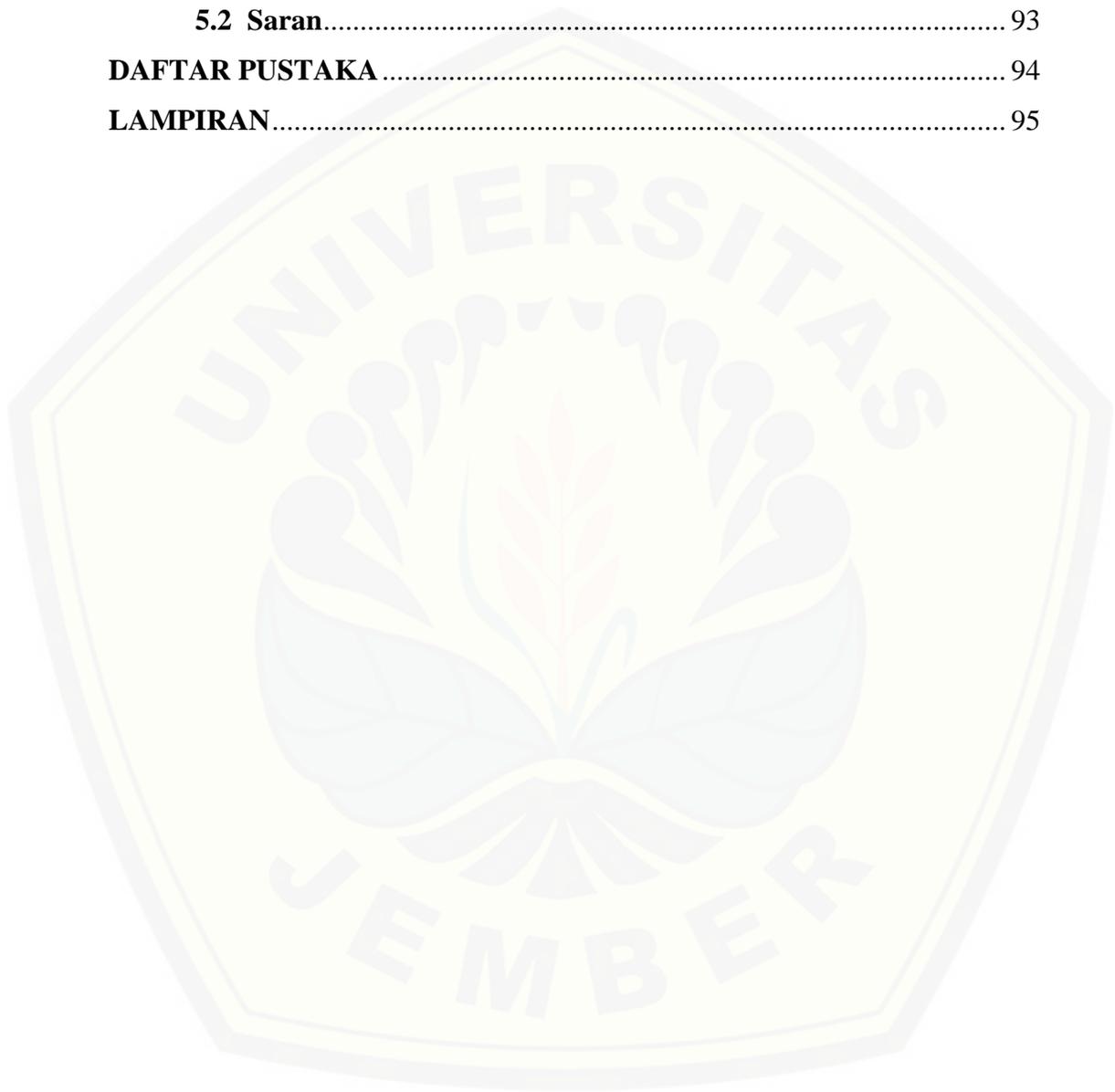
NIM 120910201087

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep	18
2.2 Konsep Pembangunan Masyarakat	19
2.3 Konsep Kemiskinan	22
2.4 Konsep Kebijakan Publik	26
2.5 Implementasi Kebijakan	34
2.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan	34
2.5.2 Model- Model Implementasi Kebijakan	35
2.6 Konsep Program Keluarga Harapan	40
2.6.1 Definisi PKH	40
2.6.2 Ketentuan-ketentuan Program Keluarga Harapan	40

2.6.3 Dasar Hukum PKH	41
2.6.4 Sasaran Penerima PKH	42
2.6.5 Besaran Bantuan PKH.....	43
2.6.6 Aturan Kebijakan PKH	44
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	49
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	50
3.3 Data dan Sumber data	52
3.4 Penentuan Informan Penelitian	52
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	54
3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data	57
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.....	60
3.6.1 Ketekunan Pengamatan.....	61
3.6.2 Triangulasi.....	61
BAB 4. Hasil dan Pembahasan	63
4.1 Lokasi Penelitian	63
4.1.1 Gambaran Umum Kab. Jember.....	63
4.1.2 Deskripsi Desa Pancakarya	71
4.1.3 Luas Wilayah Menurut Mata Pencaharian	71
4.1.4 Agama Masyarakat Setempat.....	73
4.2 Deskripsi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pancakarya	73
4.2.1 Kedudukan dan Kewenangan UPPKH.....	73
4.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Pendamping	73
4.2.3 Dusun Penerima di Desa Pancakarya	74
4.3 Deskripsi Implementasi PKH di Pancakarya	75
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	76
4.4.1 Sosialisai PKH	77
4.4.2 Proses Pendataan Penerima PKH.....	77
4.4.3 Proses Pendamping PKH	77
4.4.4 Implementasi PKH di Pancakarya	84

4.4.5 Proses Distribusi Dana PKH kepada RTSM	85
4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi PKH	87
BAB 5. PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	95

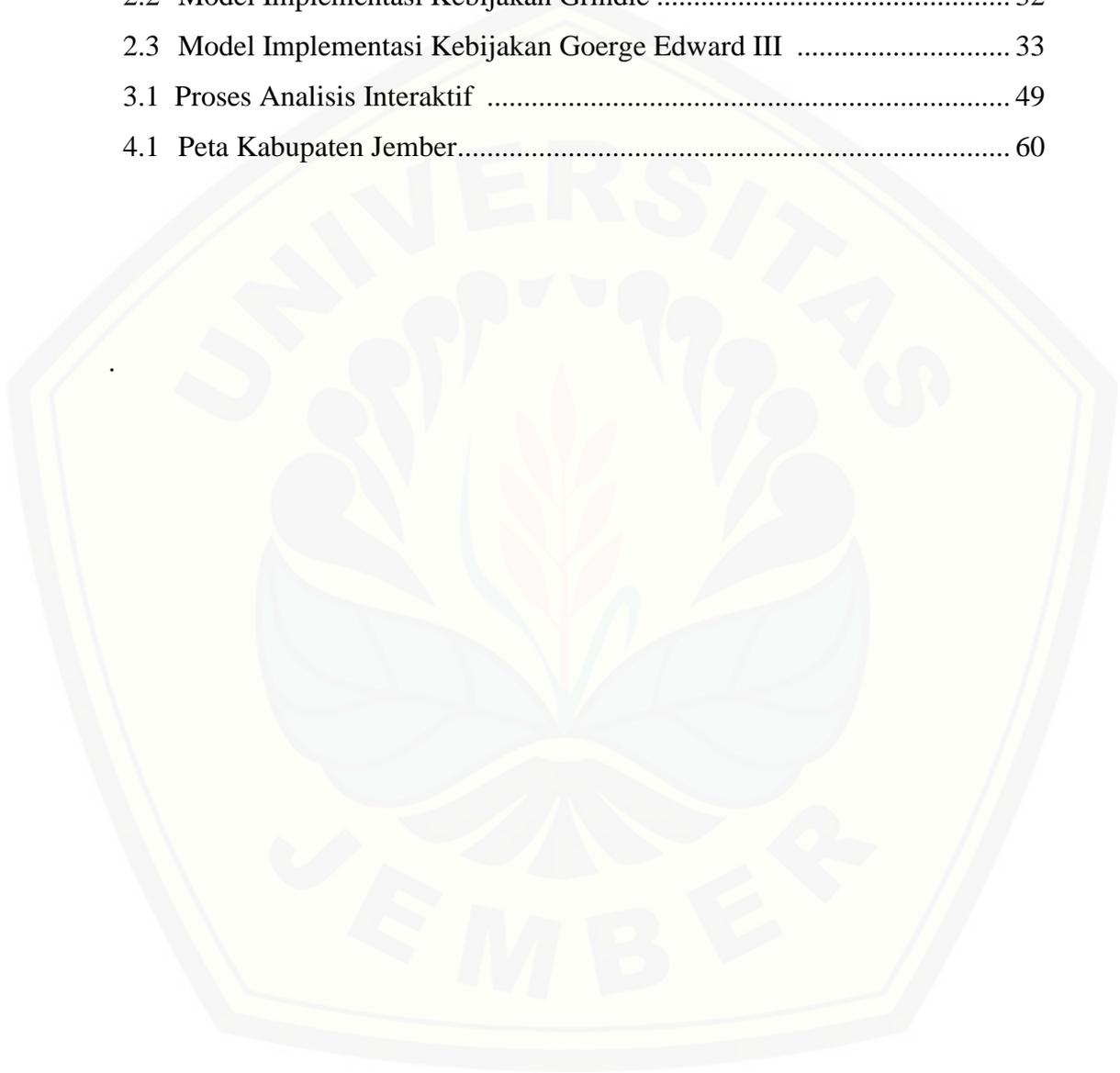


DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

	Halaman
1.1 Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2010-2016.....	3
1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Jawa Timur	7
1.3 Garis Kemiskinan, jumlah , dan persentase penduduk miskin	9
1.4 Jumlah Keluarga Penerima PKH 2010-2016.....	10
1.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kecamatan Ajung.....	11
2.1 Skenario Bantuan PKH	36
4.1 Luas wilayah, jumlah penduduk Kabupaten Jember.....	65
4.2 Luas Wilayah Desa Pancakarya	68
4.3 Jumlah Penerima Bantuan PKH desa Pancakarya 2018	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	29
2.2 Model Implementasi Kebijakan Grindle	32
2.3 Model Implementasi Kebijakan Goerge Edward III	33
3.1 Proses Analisis Interaktif	49
4.1 Peta Kabupaten Jember.....	60



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan seakan menjadi permasalahan yang tidak akan selesai ketika dibahas, semacam sulit untuk mendapat kata solusi. Hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia terjangkit permasalahan miskin. Pemerintah pun masih terus berupaya untuk mencari solusi yang efektif dalam menyelesaikannya. Bahkan dari waktu ke waktu angka kemiskinan menunjukkan peningkatan. Dalam konteks ini, siapakah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin pertanyaan tersebut akan mengundang perdebatan panjang. Namun, peneliti tidak akan membahas siapa yang bertanggungjawab. Peneliti hanya akan membahas program percepatan penanggulangan kemiskinannya.

Jika ditelisik dari penyebabnya, kemiskinan termasuk persoalan yang bersifat multidimensional. Karena tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, namun juga sosial, budaya, dan politik. (Bambang Rustanto, 2014:9). Masalah kemiskinan ini juga masih menjadi penyumbang penghambat proses pembangunan negara agar maju. Persoalan kemiskinan ini, ternyata tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga hampir seluruh negara di seluruh belahan dunia. Dan kesemuanya menginginkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Upaya pengentasan masyarakat miskin di Indonesia telah banyak dilakukan, namun masih tidak bisa mengubah kondisi kemiskinan yang masih tinggi. Hal ini dikarenakan upaya mengentaskan kemiskinan hanya rakyat miskin sebagai objek hibah sehingga hanya menggantungkan kepada pemerintah dan tidak bersikap mandiri. Pengentasan kemiskinan menjadi pekerjaan yang harus dilakukan, dimana tujuan pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keamanan dan tujuan pengentasan kemiskinan yaitu untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan hidup bagi masyarakat miskin tersebut, dengan memandirikan usaha pada masyarakat.

Kemiskinan dapat membuat permasalahan pada negara, baik bentuk kriminalitas dan masalah lain seperti pengangguran dan lain-lain. Masalah

kemiskinan harus dituntaskan secara mendasar, karena kemiskinan tersebut menyangkut tingkat kehidupan manusia, bukan hanya sekedar permainan angka relatif saja. Pemecahan masalah ini harus dilakukan secara multidisipliner oleh para ahli karena masalahnya bersifat multidimensional, yang penanggulangannya tidak dapat mengandalkan sistem mekanisme pasar. Kemiskinan akan menggerogoti hasil pembangunan atau akan menjadi faktor penghambat pembatas bagi pembangunan. Maka dari itu, masyarakat perlu untuk disejahterahkan.

Berbicara kesejahteraan rakyat, negara Indonesia sudah mempunyai cita-cita untuk mensejahterahkan rakyatnya sejak kali awal proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Lebih tepatnya setelah Undang-Undang disahkan. Cita-cita untuk mensejahterakan rakyat itu teramanatkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berbunyi, bahwa dibentuknya Negara Indonesia dan dibentuknya pemerintah negara Indonesia salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jika dimaknai isi amanat tersebut, fenomena kemiskinan di Indonesia merupakan tanggungjawab dari Negara yakni pemerintah. Adapun kutipan preambuli UUD 1945 tersebut sebagai berikut, "... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ..." begitupun dengan Kabupaten Jember, sudah seharusnya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan membawa ke dalam satu kata, yakni sejahtera.

Sebelum mengetahui, apakah Jember sudah terkategori Kabupaten sejahtera atau bukan, mari kita lihat profil kemiskinan Jember menurut Badan Pusat Statistik (BPS) data per Juni 2017 terlebih dahulu. Kabupaten Jember menempati peringkat ke 17 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Disebutkan pada tahun 2016 penduduk miskin di Jember mencapai 10,97 persen. Artinya jumlah penduduk yang berada pada ekonomi lemah sebanyak 265,10 jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 juga tercatat, garis kemiskinan menjadi Rp. 299.823,- per kapita per bulan.

Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,25 poin, yakni dari 1,58 pada tahun 2015 menjadi 1,33 pada tahun 2016. Sedang indeks kedalaman kemiskinan (P1), Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan yakni sebesar 0,04 poin atau turun menjadi 0,29 pada tahun 2016. Penurunan kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 1.1 Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2010 - 2016

Tahun	Jumlah penduduk miskin	Kemiskinan naik (+)/turun (-)
2010	311.800 jiwa	-
2011	292.100 jiwa	19. 700 jiwa (-)
2012	270.000 jiwa	22. 100 jiwa (-)
2013	278.500 jiwa	8.500 jiwa (+)
2014	270.400 jiwa	8. 100 jiwa (-)
2015	269.540 jiwa	860 jiwa (-)
2016	265.100 jiwa	4.440 jiwa (-)

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2017

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta kehadiran negara dalam mengentaskan kemiskinan. Maka pemerintah harus memberikan perhatiannya secara serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan perlu membuat suatu kebijakan atau program nasional yang berkaitan dengan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara adil pula merata. Kebijakan atau program tersebut dikeluarkan dengan tujuan supaya masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi lebih baik.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan, diwujudkan pemerintah melalui program yang diselenggarakan kementerian sosial dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Tujuan Umum dari Program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman Negara-negara lain, program seperti ini memiliki manfaat yang besar bagi keluarga atau masyarakat yang sangat miskin.

Berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 08/HUK/2007 disusunlah program Pedoman Umum PKH. Program ini merupakan suatu program pemerintah yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin (KSM) sebagai upaya perlindungan sosial. Program ini mencakup dua bidang kegiatan yaitu pendidikan dan kesehatan yang memiliki persyaratan-persyaratan antara lain RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0 - 15 tahun dan/ atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih.

Adapun tujuan utama dari PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan PKH antara lain: (i) meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM , (ii) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, (iii) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, dan (iv) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM (Pedoman Umum PKH, 2010).

Jika ditelisik dari sejarahnya, program ini dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang (UU) no. 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial. Pula turunan dari UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan. Kemudian pada tahun

2010 pemerintah mengeluarkan Inpres no. 3 yang menjelaskan program pembangunan yang berkeadilan. Dan dikuatkan lagi dengan Perpres tahun 2010 no. 15 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Maka kuatlah sudah bahwa, program PKH ini musti dijalankan.

Dari dasar UU tersebut, pemerintah memberikan bantuan uang tunai Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan, atau yang dimaksud dengan tujuan dari pelaksanaan program PKH. Terkait persyaratan yang dimaksud itu, adalah kesehatan dan pendidikan sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran dari program ini yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMP.

Namun, apabila tidak ada ibu, bibi dan nenek atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan. Secara ringkas, penerima utama bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Di dalam dunia pendidikan, program ini diharap mampu memberi peningkatan partisipasi kewajiban wajib belajar 9 tahun. Sedang pada kesehatan, program ini memberi jaminan kesehatan kepada balita dan anak-anak keluarga miskin agar tidak mengalami gizi buruk.

Sebenarnya PKH ini bukan hal baru dalam metode pengentasan kemiskinan. Sebab program semacam ini pertama kali sudah dilaksanan di negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolombia, Honduras, Jamaica, dan Nikaragua. Namun Cuma berbeda nama, yakni Conditional Cash Transfer (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Dan program ini terbilang berhasil pada pelaksanaannya.

Sedang di Indonesia, PKH ini mulai diselenggarakan pada tahun 2007 di 7 provinsi. Peluncurannya berada di Provinsi Gorontalo pada Juli 2007, sebagai tahap awalan atau uji coba program ini dilaksanakan secara berkesinambungan sampai pada tahun 2015 dan mampu untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals dan MDGs). Sejauh ini, pelaksanaan PKH di Indonesia dianggap mempunyai kontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

Fokus dari PKH ada pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan terjamin pendidikan seseorang akan berjalan dengan baik. Dengan kualitas pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat.

Akan tetapi, tidak semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan berkualitas. Macam masyarakat dari menengah kebawah masih banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Kebanyakan dari mereka terkendala oleh mahalnya pembiayaan untuk sekolah. Bahkan, sampai ada fenomena pekerja anak. Karena mereka musti menopang keuangan keluarga agar kelangsungan hidup mereka bisa terjamin, walau usia mereka berada antaran 7-16 tahun.

Disamping program PKH ini, ada strategi lain yang bisa digunakan untuk membantu anak putus sekolah agar tetap bisa bersekolah, menggunakan beasiswa miskin, Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS). Namun, program tersebut masih kurang maksimal, karena masih banyak anak-anak yang berada pada lapisan ekonomi bawah tidak bisa sekolah. Namun, kehadiran PKH menjadi hembusan solusi baru untuk mengatasi permasalahan itu. Karena dengan program PKH, anak-anak RTSM peserta PKH akan menjadi lebih mudah untuk mengakses pelayanan pendidikan.

Lansiran dari Direktorat Jaminan Sosial tahun 2013:9 menjelaskan, salah satu tujuan akhir PKH adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak-anak RTSM, khususnya SD/MI, SMP/MTS, serta untuk mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia. Upaya yang dilakukan agar program ini berhasil, adalah dengan memberi motivasi RTSM agar RTSM mendaftarkan anak-anaknya sekolah. Tak lupa, mereka juga akan didorong agar berkomitmen atas kehadiran anak dalam mengikuti KBM minimal 85 % dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung.

Meski tergolong program yang cukup berhasil, bukan berarti tidak ada hambatan dalam implementasinya. Permasalahan klasik dalam setiap program bantuan yang lain adalah soal kevalidan data, begitupun dengan program PKH ini. Belum lagi adanya indikasi pemotongan penyaluran bantuan oleh petugas, karena besaran yang diterima oleh masyarakat berbeda. Data tersebut didapat dari lansiran berita sumber tempo.co

Terlepas dari kendala yang dihadapi pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), Kabupaten Jember membuktikan dirinya bahwa program ini berdampak pada pemberantasan kemiskinan di Jember. Hal itu terbukti pada tahun 2016 ada prosentasi penduduk miskin di Jember turun sebesar 0,25 poin dibanding tahun sebelumnya (BPS Jember tahun 2017). Walau tidak bisa diklaim sepenuhnya bahwa penurunan tersebut akibat PKH ini.

Meski tidak bisa dikatakan bahwa penurunan angka kemiskinan sepenuhnya disebabkan oleh program PKH ini, namun program ini juga berperan dalam pengentasan kemiskinan. Karena Bupati Jember periode 2016-2020 mengatakan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) program PKH masuk dalam kluster untuk pemberantasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember.

Di dalam RPJMD 2016 Bupati Jember mempunyai strategi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan inklusif. Dalam penanggulangan ini, pemerintah membaginya dalam empat klaster. Di dalam klaster ini, PKH menempati klaster pertama bersama program bantuan beras kesejahteraan (Rastra).

Di Jember sendiri, penerima program PKH awalnya ada 11 kecamatan, namun seiringnya waktu. Pada tahun 2009 penerima PKH di Jember diperluas pada 4 Kecamatan, yakni Ajung, Ambulu, Wuluhan, dan Puger. Sehingga totalnya ada 15 Kecamatan yang menerima program PKH ini. Sebelumnya, Kecamatan penerima program PKH yang berjumlah 11 itu ada di Jombang, Kencong, Rambipuji, Sukorambi, Balung, Kaliwates, Patrang, Arjasa, Kalisat, Pakusari, dan Mayang. (Lansiran Web kominfo.jatimprov.go.id)

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi dari PKH Kecamatan Ajung. Disebabkan, Ajung merupakan Kecamatan Tambahan. Dan program PKH pada tahun 2016 juga berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Menjadi menarik lagi kemudian, ketika Kecamatan Ajung yang notabene daerah subur dengan hamparan sawah yang luas serta berdekatan dengan perkebunan, ternyata masih menyisakan pilu.

Jika melihat indeks pembangunan (IPM) Kabupaten Jember, pada tahun 2016 mencapai 64,96 atau tumbuh sebesar 1,48 %. Selama periode ini, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 68,54 tahun, meningkat 0,17 tahun. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,79 tahun, meningkat 0,48 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 6,06 tahun, juga meningkat 0,01 tahun. Meski IPM Kabupaten Jember mengalami kenaikan, namun masih masuk peringkat ke 31 dari 38 Kecamatan yang ada.

Hal lain yang menjadi sorotan dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yaitu dengan melihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Jawa Timur sendiri, Kabupaten Jember menduduki 10 besar dengan IPM terendah. Berikut perkembangan IPM dari kabupaten/kota di Jawa Timur lansiran BPS tahun 2017.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2017

Kabupaten/Kota (1)	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran (000 Rupiah)		IPM		Peringkat IPM	
	2016 (2)	2017 (3)	2016 (4)	2017 (5)	2016 (6)	2017 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2016 (10)	2017 (11)	2016 (12)	2017 (13)
Pacitan	71,18	71,31	12,19	12,41	6,89	7,02	8.048	8.288	65,74	66,51	28	29
Ponorogo	72,18	72,27	13,69	13,70	6,97	7,01	8.908	9.107	68,93	69,26	22	23
Trenggalek	73,03	73,15	12,09	12,10	7,19	7,20	8.829	9.034	67,78	68,10	24	25
Tulungagung	73,40	73,53	13,03	13,04	7,73	7,82	9.881	10.114	70,82	71,24	14	14
Blitar	72,89	72,99	12,42	12,43	7,25	7,26	9.467	9.828	68,88	69,33	23	21
Kediri	72,20	72,25	12,57	12,86	7,58	7,65	10.140	10.326	69,87	70,47	18	18
Malang	72,05	72,12	12,28	12,56	6,98	7,17	9.018	9.356	67,51	68,47	25	24
Lumajang	69,38	69,50	11,77	11,78	6,05	6,20	8.311	8.503	63,74	64,23	35	36
Jember	68,37	68,54	12,31	12,79	6,05	6,06	8.409	8.698	64,01	64,96	33	31
Banyuwangi	70,11	70,19	12,55	12,68	6,93	7,11	11.171	11.438	69,00	69,64	20	20
Bondowoso	65,89	66,04	12,87	12,94	5,54	5,55	10.007	10.086	64,52	64,75	31	33
Situbondo	68,41	68,53	12,99	13,00	5,68	6,03	9.106	9.178	65,08	65,68	30	30
Probolinggo	66,31	66,47	12,05	12,06	5,67	5,68	10.170	10.239	64,12	64,28	32	34
Pasuruan	69,86	69,90	11,81	12,05	6,58	6,82	9.198	9.556	65,71	66,69	29	28
Sidoarjo	73,67	73,71	14,13	14,34	10,22	10,23	13.320	13.710	78,17	78,70	4	4
Mojokerto	72,03	72,10	12,44	12,52	7,76	8,15	11.798	12.240	71,38	72,36	13	12
Jombang	71,77	71,87	12,69	12,70	7,68	8,06	10.237	10.560	70,03	70,88	17	16
Nganjuk	71,04	71,11	12,82	12,83	7,34	7,38	11.451	11.560	70,50	70,69	15	17
Madiun	70,55	70,77	13,11	13,12	7,00	7,30	10.904	11.012	69,67	70,27	19	19
Magetan	72,09	72,16	13,71	13,72	7,66	7,94	10.988	11.288	71,94	72,60	11	11
Ngawi	71,63	71,74	12,65	12,67	6,54	6,66	10.810	10.899	68,96	69,27	21	22
Bojonegoro	70,67	70,83	12,11	12,34	6,65	6,71	9.420	9.553	66,73	67,28	26	26
Tuban	70,67	70,80	12,17	12,18	6,25	6,48	9.353	9.540	66,19	66,77	27	27
Lamongan	71,77	71,87	13,44	13,45	7,29	7,54	10.252	10.664	70,34	71,11	16	15
Gresik	72,33	72,36	13,69	13,70	8,94	8,95	11.961	12.375	74,46	74,84	8	8
Bangkalan	69,77	69,82	11,56	11,57	5,13	5,14	8.030	8.192	62,06	62,30	37	37
Sampang	67,62	67,67	11,37	11,38	3,79	4,12	8.096	8.352	59,09	59,90	38	38
Pamekasan	66,95	67,05	13,35	13,61	6,08	6,25	7.975	8.311	63,98	64,93	34	32
Sumenep	70,56	70,71	12,73	12,74	5,08	5,22	7.846	8.316	63,42	64,28	36	34
Kota Kediri	73,65	73,69	14,61	14,95	9,89	9,90	11.070	11.550	76,33	77,13	7	5
Kota Blitar	73,09	73,17	14,00	14,01	9,88	9,89	12.499	12.910	76,71	77,10	5	6
Kota Malang	72,68	72,77	15,38	15,39	10,14	10,15	15.732	15.939	80,46	80,65	1	2
Kota Probolinggo	69,79	69,86	13,54	13,55	8,47	8,48	10.792	11.390	71,50	72,09	12	13
Kota Pasuruan	70,93	71,02	13,57	13,58	9,08	9,09	12.295	12.557	74,11	74,39	9	9
Kota Mojokerto	72,78	72,86	13,80	13,81	9,93	9,98	12.449	12.804	76,38	76,77	6	7
Kota Madiun	72,44	72,48	14,19	14,20	11,09	11,10	15.300	15.415	80,01	80,13	3	3
Kota Surabaya	73,87	73,88	13,99	14,41	10,44	10,45	16.295	16.726	80,38	81,07	2	1
Kota Batu	72,20	72,25	13,62	14,03	8,45	8,46	11.772	12.057	73,57	74,26	10	10

Sumber: BPS tahun 2017

Dari data di atas, Kabupaten masih perlu usaha yang terus menerus untuk menjadikan masyarakatnya sejahtera. Karena tanpa usaha yang serius, maka Kabupaten Jember akan jauh dari kata sejahtera. Dari data berikut dapat dilihat, bahwa sebenarnya Kabupaten Jember sudah melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan baik. Dapat dilihat dari grafik kemiskinan lansiran dari BPS tahun 2017.

Grafik 1.1 Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2010-2016



Berikut penjelasan dari grafik di atas. Dalam kurun waktu dua, yakni tahun 2010 s.d 2016, persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten jember mengalami penurunan sebesar 0,25 poin. Dari grafik terlihat penurunan itu dari awalnya 11,22 persen pada tahun 2015 menjadi 10,97 persen pada tahun 2016. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Kabupaten jember yang semula berjumlah 269,54 ribu jiwa menjadi 265,10 ribu jiwa pada tahun 2016.

Dari data di atas, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Tabel 1.3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jember Tahun 2010 s.d Tahun 2016

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah /kapita bulan)	Jml Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (000)	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	202.010	311,80	13,27	
2011	226.546	292,10	12,44	-0,83
2012	242.440	277,00	11,76	-0,68
2013	260.106	278,50	11,68	-0,08
2014	267.962	270,40	11,28	-0,40
2015	283.510	269,54	11,22	-0,06
2016	299.823	265,10	10,97	-0,25

Sumber BPS Jember Tahun 2017

Dari tabel di atas, dapat kita baca bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah menyangkut seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2).

Berikut penjelasan dari tabel di atas, yakni Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2016 ini mengalami penurunan sebesar 0,25 poin. Yakni dari 1,58 pada tahun 2015 menjadi 1,33 pada tahun 2016. Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan yakni sebesar 0,04 poin atau turun menjadi 0,029 pada tahun 2016. Penurunan kedua indeks yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit.

Sejauh ini Pelaksanaan PKH di Indonesia dianggap berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia, sehingga Berdasarkan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor.252/SK/JS/08?2014 Maka Per Tanggal 5 Agustus 2014 Pengangkatan Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan Pengembangan Kabupaten/Kota dan Kecamatan di 2522 (Dua Ratus Lima Puluh Dua) Kabupaten/Kota (Tiga Puluh Satu) Provinsi Tahun 2014. Kabupaten Jember juga terpilih sebagai Kabupaten yang diterapkan sebagai pengembangan Program PKH mulai tahun 2009.

Tabel 1.4 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Kabupaten Jember dari Tahun 2010-2016.

No	Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah KPM	Kenaikan jumlah KPM
1	2010	15	15.648	-
2	2011	15	14.776	872

3	2012	18	19.412	4.636
4	2013	21	19.344	68
5	2014	31	30.291	11.947
6	2015	31	32.630	2.239
7	2016	31	68.076	35.446

Sumber: Rekap Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Kabupaten Jember

. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan kecamatan tersebut memiliki ancaman tingkat kemiskinan dan putus sekolah paling tinggi di Kabupaten Jember. Ajung merupakan salah satu Kecamatan di kecamatan Ajung Kabupaten Jember, berdasarkan observasi serta memperoleh data melalui wawancara dengan koordinator penerima manfaat. Secara kasat mata, keadaan penduduk lebih di dominasi oleh buruh tani, pedagang, dan buruh bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat masih di dominasi oleh sector tradisonal.

Kemiskinan juga menjadi permasalahan utama Kecamatan Ajung. Dari data BPS menyuguhkan bahwa lebih dari 20 persen penduduk Kecamatan Ajung mengidap kemiskinan. Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk miskin Kecamatan Ajung pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun itu pula, Kabupaten Jember melalui rilis BPS telah mengatakan bahwa pada tahun yang bersamaan itu pula telah menyatakan penurunan tingkat kemiskinan.

Tabel 1.5 Jumlah dan persentase penduduk miskin Kecamatan Ajung

Desa	Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk	Persentase penduduk miskin (%)
Mangaran	2.698	12.294	22

Sukamakmur	985	10.657	9
Klompangan	2.339	10.329	23
Pancakarya	1.819	11.978	15
Ajung	4.211	16.757	25
Wirowongso	1.720	9.713	18
Rowo Indah	1.033	5.060	20

Sumber: BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Ajung dalam angka 2017

Dari tabel diatas, meski Desa Pancakarya buka merupakan desa dengan prosentase penduduk miskin terbanyak, namun karena Desa Pancakarya tidak pernah mendapat sentuhan penelitian maka menjadi menarik kemudian untuk mengulas desa dengan prosentasi penduduk miskin yang sedang-sedang ini. Dengan prosentase yang sedang-sedamh tersebut, perlu untuk dilakukan kajian tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi angka kemiskinan di Desa Pancakarya.

Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung tahun 2018, ternyata jumlahnya tidak sedikit yakni 452. Dengan jumlah sebanyak itu, sudah menjadi sebuah tanggungan bahwa Desa Pancakarya terlepas atau minimal prosesntase jumlah penduduk miskin berkurang. Namun yang terjadi malah prosentase pengurangan jumlah penduduk miskin berada pada grafik stagman. Hal ini menjadi sebuah perhatian kemudian ketika permasalahan pengurangan penduduk miskin belum terurai.

Sebab sejauh ini Pelaksanaan PKH di Indonesia dianggap berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia, sehingga Berdasarkan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor.252/SK/JS/08?2014 Maka Per Tanggal 5 Agustus 2014 Pengangkatan Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan Pengembangan Kabupaten/Kota dan Kecamatan di 2522 (Dua Ratus Lima Puluh Dua) Kabupaten/Kota (Tiga Puluh Satu) Provinsi Tahun 2014.

Namun dalam implementasinya, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung masih menemui beberapa kendala. Secara administratif masih terbilang kurang tertata dengan baik. Dan juga

penerima bantuan ini, bis dibilang tidak merata. Berikut kata operator UPPKH Desa Pancakarya, Dodik mengatakan, *“sebenarnya masyarakat miskin di Desa ini banyak, tapi terkendala oleh kuota yang dibatasi oleh pemerintah. Pula proses validasi yang bisa dibilang rumit, membuat beberapa masyarakat miskin tidak menerima,”* katanya. Maka dari itu menjadi menarik kemudian untuk membahas implementasi PKH dalam penanggulangan kemiskinan. Berangkat dari latar belakang tersebut peneliti tertarik meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Pada Tahun 2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Usaman dan Akbar (2005:16) masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) yang terjadi. Namun menurut Sugiyono (2001:35), rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Jika masalah terdefinisi sebagai suatu kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Dengan kata lain, rumusan masalah menurut Kountur (2003:25) adalah suatu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variable pada suatu fenomena. Hal-hal mengenai rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Masalah hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya
2. Rumusan itu hendaklah padat dan jelas
3. Rumusan itu hendaklah memberi petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu (Suryabrata, 2008:13).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Ddesa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2018?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, apapun yang diteliti dan siapapun yang meneliti pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan penelitian ini dimaksudkan supaya penulis mempunyai arah yang jelas dan tegas. Dalam Arikunto (2002:49) dijelaskan bahwa, “tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dilihat dari isinya sesuatu yang dicapai merupakan tujuan penelitian,”

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Pancakrya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan khususnya kajian Pengetahuan khususnya kajian Ilmu Administrasi Negara dan menjadi bahan dasar bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang sama dengan kajian yang lebih mendalam tentang masalah kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat serta kebijakan publik, pun pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam pelaksanaan program agar bisa ditingkatkan lagi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, khususnya terkait konsep implementasi kebi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Fenomena kemiskinan telah menjadi banyak pembicaraan, tak terkecuali akademisi. Hal tersebut, terbukti dengan banyaknya kajian serta teori yang membahas mengenai keduanya. Seiring banyaknya permasalahan yang ditimpa oleh masyarakat lapisan bawah, diringi pula kemunculan kebijakan yang memfokuskan kajian dan gerakannya ke sana. Tidak dipungkiri, bila mayoritas masyarakat miskin. Macam masyarakat Ajung berpendidikan bawah dan kondisi kesehatan yang rendah. Artinya, masyarakat Ajung membutuhkan bantuan dari luar dirinya untuk membuat dirinya sejahtera.

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teori berbeda dengan penelitian kuantitatif. Karena pada penelitian kualitatif, teori bukan acuan atau pendoman. Namun, hanya sebagai bekal pengetahuan untuk kemudian didialogkan dengan data penelitian, sehingga mendapatkan hasil akhir yang disebut akademis. Menurut Bungin (2011:23) bahwa:

“sebagaimana stereotip dalam penelitian kualitatif, terkadang ketika suatu masalah kualitatif harus dipecahkan, peneliti cenderung dipengaruhi oleh stereotip teoritis kualitatif dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Padahal, pada prinsipnya, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, dengan demikian teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.”

Masih menurut Bungin (2011:24), dalam penelitian kualitatif mempunyai dua model, yaitu:

- a. Deduksi, teori menjadi alat peneliti sejak memilih dan menemukan masalah hingga menganalisis data. Model penggunaan teori digunakan pada penelitian deskriptif kualitatif, biasanya.
- b. Induksi, teori bukan menjadi sebuah hal yang penting, justru data yang paling penting. Biasanya, digunakan pada penelitian deskriptif verifikatif.

Penggunaan teori hanya untuk memahami obyek penelitian, sehingga pada pengumpulan data lebih mudah.

2.1 Konsep

Konsep digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya, Singarimbun dan Effendi (1989:34) mengemukakan bahwa, “Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu”. Jadi peranan konsep dalam penelitian sangat penting karena menghubungkan dunia observasi dengan dunia teori atau antara abstraksi dengan realita. Untuk itu konsep perlu didefinisikan secara tepat sehingga tidak terjadi kesalahan pengukuran.

Konsep ilmu Administrasi negara berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, sering kali pula diartikan sebagai pemerintah. Seperti halnya dalam genusnya, administrasi, adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan konsep yang mendasar pula dalam administrasi negara. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu; pada setiap waktu, tempat, bidang, atau tingkatan, bahkan kegiatan tertentu, terdapat tujuan-tujuan tertentu. Tetapi sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman, dan tujuan, yang menjadi landasan kerja administrasi negara. Pada umumnya (meskipun tidak semuanya) gagasan-gagasan dasar tersebut ada dalam konstitusi negara yang bersangkutan. Hal tersebut juga menyangkut masalah-masalah dalam negara antara lain pembangunan dan kemiskinan masyarakat.

Berdasarkan paparan tersebut, maka konsep yang dipakai penelitian ini adalah:

1. Konsep Pembangunan Masyarakat
2. Konsep Kemiskinan
3. Konsep Kebijakan publik
4. Konsep Implementasi Kebijakan

5. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)

2.2 Konsep Pembangunan Masyarakat

Konsepsi pembangunan sesungguhnya sering dirumuskan melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan diberbagai negara-negara umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek pendidikan dan kesehatan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab, sehingga setiap kebijakan dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan.

Dari hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Namun demikian, konsepsi pembangunan yang dikemukakan di atas sejalan dengan kajian terhadapnya maupun implementasi diberbagai negara dan wilayah lain, dikemukakan berbagai kelemahan.

Kelemahan tersebut muncul seiring ditemukannya fenomena yang khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan, pengelolaan public good yang tidak tepat, lemahnya mekanisme kelembagaan dan sistem politik yang kurang berkeadilan. Kelemahan-kelemahan itulah yang menjadi penyebab hambatan terhadap gerakan maupun aliran penduduk, barang dan jasa, prestasi, dan keuntungan (benefit) dan kerugian (cost) di dalamnya. Akibatnya, hasil pembangunan menjadi mudah diketemukan antar wilayah, sektor, kelompok masyarakat, maupun pelaku ekonomi. Implisit, juga terjadi dichotomy antar waktu dicerminkan oleh ketidakpercayaan terhadap sumberdaya saat ini karena penuh dengan berbagai resiko (high inter temporal opportunity cost).

Menurut Bryan dan White (1982) dalam Surjono dan Nugroho (2008:2) pembangunan memiliki arti sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan

manusia dalam mempengaruhi masa depannya, yang kemudian hal tersebut memiliki lima implikasi utama di antaranya:

1. pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*),
2. pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*),
3. pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Kepercayaan dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuatan untuk memutuskan (*empowerment*),
4. pembangunan berarti membangkitkan kemampuan membangun secara mandiri (*sustainability*), dan
5. pembangunan berarti mengurangi ketergantungan, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk dibahas. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan.

Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah.

Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya

menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Pembangunan manusia merupakan suatu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai faktor kunci yang memainkan peran penting dalam segala segi. Pembangunan berbasis manusia mencakup pembangunan masyarakat (community based development) dan pembangunan manusia (people centered development).

Dalam paradigma ini berusaha mengangkat martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki harga diri, kemampuan, intelegensi dan perasaan. Manusia tidak disamakan dengan alat produksi untuk melipat gandakan hasil semata, hendaknya manusia dihargai dan dihormati dengan cara meningkatkan kualitas SDM sehingga menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik (Surjono dan Nugroho, 2008:13).

Menurut Tjokrowinoto (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2013:18) memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia) di antaranya:

1. prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri,
2. fokus di antaranya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka,

3. pendekatan ini mentoleransi variasi vokal dan karenanya sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal,
4. pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar, dan
5. proses pembentukan jejaring (*Networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat serta satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri.

Pembangunan berpusat pada rakyat (manusia) adalah asumsi bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itulah pembangunan tersebut dilakukan secara terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta untuk mengerahkan minat masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi masyarakat, dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia bukan mengabadikan ketergantungan antara birokrasi dengan masyarakat (Mardikanto, 2013:18).

Dari pengertian Mardikanto di atas, dalam observasi awal peneliti. Program PKH yang telah digulirkan oleh pemerintah di beberapa daerah, menjadi hal penting untuk dijadikan perhatian. Karena ada hubungan birokrasi dengan masyarakat untuk terus bersinergi memberantas kemiskinan. Dari segi birokrasi, ada petugas yang siap mendampingi masyarakat untuk sejahtera, sedangkan dari segi masyarakat, masyarakat penerima bantuan pun diwajibkan mentaati syarat-syarat yang diberlakukan. Uniknya, program PKH ini bersyarat dan ada pertanggungjawaban.

2.3 Konsep Kemiskinan

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003:194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan

karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997:137). Sedangkan menurut Sar A. Levitan dalam Ala (1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002:3-4) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.

Kemudian Maipita berpendapat lain mengenai kemiskinan, yakni sebenarnya kemiskinan itu merupakan suatu kondisi ketiadaan tempat tinggal, sakit dan tidak mampu untuk berobat ke dokter, tidak mampu untuk bersekolah, dan tidak tahu baca tulis. Namun, secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang itu tidak mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri dikarenakan tidak adanya akses untuk menggapainya. Sedangkan Suharto berpendapat lain (2014:132), mengatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, dan terbagi ke dalam beberapa dimensi, diantaranya:

1. Kemiskinan yang disebabkan globalisasi, artinya adanya golongan masyarakat yang menjadi korban akibat globalisasi. Hal itu disebabkan oleh persaingan pasar bebas, yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan, artinya ketidakmampuan masyarakat untuk menyamai pembangunan yang ada di sekitarnya, karena keterbatasan kapasitas dan kapabilitas.
3. Kemiskinan sosial, yakni kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konseptual, merupakan kemiskinan yang terjadi akibat sesuatu di luar dirinya. Macam bencana alam, konflik, dan kerusakan alam.

Menurut Suryawati (2005:17), kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan,

sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

1. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
2. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
3. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan

Menurut Suryawati (2005:17), kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Lanjut Suryawati (2005:20), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yakni: Pertama, *policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan. Kedua, *Socio-economic dualism*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena *poal produksi kolonial*, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala besar dan berorientasi ekspor.

Ketiga, *population growth*, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deraet hitung. Keempat, *resources management and the environment*, adalah unsur *mismanagement sumber daya alam dan lingkungan*, seperti

manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas. Kelima, natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.

Ketujuh, the marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki. Kedelapan, cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.

Kesembilan, eksploitatif inetrmediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir. Kesepuluh, internal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan. Kesebelas, interbational processe, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Lain halnya dengan beberapa ahli di atas tentang kemiskinan, BPS (Badan Pusat Statistik) menggolongan kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan).

Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin. Sedangkan menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram

konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan (Suryawati, 2005).

Dalam penelitian ini, ukuran orang miskin untuk daerah pedesaan bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 Kg nilai tukar beras per orang tahun. Sedangkan untuk daerah perkotaan ukuran orang miskin bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 Kg nilai tukar beras per orang per tahun. Pengertian ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Suryawati (2005) yang membahas mengenai ukuran orang bisa dikatakan miskin.

Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan berdasarkan pada Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. (Suryawati, 2005:26)

Menurut Tansey dan Ziegley (dalam Suharto, 2003:23), faktor kemiskinan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam keluarga, seperti: (1) tingkat karakteristik usaha, termasuk didalamnya sumberdaya manusia, jenis usaha yang dilakukan, sumber modal dan pemasaran, (2) tingkat motivasi, terutama berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha, (3) tingkat dukungan anggota keluarga, (4) pola produksi dan konsumsi keluarga. Faktor eksternal merupakan unsur-unsur penyebab yang berasal dari luar yang mempengaruhi keberdayaan keluarga miskin, yang meliputi: (1) perbedaan peluang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, (2) sempitnya mendapatkan peluang pekerjaan, (3) perbedaan aksesibilitas terhadap sumberdaya.

2.4 Konsep Kebijakan Publik

Menurut James A. Aderson dalam Subarsono (2005:2), kebijakan publik merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintahan. Senada dengan itu, Laswell dan Kaplan (2005:77) menuturkan bahwa, kebijakan

publik merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, sebab kebijakan mengandung suatu nilai di dalamnya.

Kebijakan menurut memiliki banyak pengertian, sedangkan Wahab (2008:2) mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar sesuai dengan UU no. 10/2004 tentang pembentukan perundang-undangan pasal 7, hirarkinya yaitu: (1). UUD Negara RI tahun 1945. (2). UUD/peraturan pemerintah pengganti undang-undang. (3). peraturan pemerintah. (4). Peraturan Presiden. (5). Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjabar pelaksana, dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula berbentuk keputusan bersama antar menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota.

Sedangkan menurut Dye (2008:1) "*public policy is whatever government choose to do or not to do.*" Sedangkan menurut Anderson sebagaimana dikutip Winarno (2007:18) menyatakan "kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: "Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan" (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah

dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah:

“*What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs.* (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)” (Widodo, 2001:190).

Pendapat Edward III dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000:56). Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok

politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan.

Dalam perspektif lain, suatu kebijakan publik ternyata tidak hidup dalam ruang hampa ataupun terlahir secara antah barantah, tetapi bergerak di dalam dan dilahirkan dari apa yang disebut sebagai sistem politik. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, Wibawa (2011:1) menegaskan, “setiap sistem politik membuat kebijakan publik. Bahkan dapat dikatakan bahwa produk utama dari sistem dan proses politik adalah kebijakan publik. kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau kepentingan.

Bila mencermati teori sistem politik dari Easton dalam Sjamsudin (1988), maka dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari proses pengolahan input. Selanjutnya, Easton membagi input menjadi dua macam, yaitu tuntutan dan dukungan. Menurut Easton dalam Sjamsudin (1988:1,12) “input berupa tuntutan mengacu pada kelangkaan sumber-sumber dan keterbatasan kemampuan sistem politik dalam rangka memenuhi dan mengalokasikan sumber-sumber yang langka secara memuaskan kepada masyarakat. Sementara input berupa dukungan mengacu pada energi yang dibutuhkan oleh sistem politik tersebut dalam rangka memenuhi tuntutan-tuntutan yang muncul.”

Jika dicari padanan konseptualnya dalam Subarsono (2007), input dapat pula disebut sebagai masalah publik. Menurut Subarsono (2007:24) “suatu gejala menjadi masalah publik ketika gejala tersebut dirasakan sebagai kesulitan bersama oleh sekelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah. Oleh karena itu, masalah publik dapat dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang diinginkan publik, dan pemenuhannya hanya mungkin melalui kebijakan pemerintah.” Berkaitan dengan hal ini, maka Subarsono (2009:5) menyatakan “kebijakan publik yang dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik.” Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Knoepfel *et al* (2007:21-23) yang menyatakan “*all policies aim to resolve a public problem that is identified as such on the governmental agenda. The essential object of policy analysis is not political power in itself, but its use for the purpose of resolving collective problem.*”

Karena kebijakan publik adalah keputusan dan tindakan pemerintah guna menyelesaikan masalah publik, maka dalam perspektif riset/penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan tersebut, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai hipotesis. Hal ini diungkapkan oleh Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Amir Santoso dalam Ekowati (2009:6) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.” Berkaitan dengan pendapat ini, Subarsono (2009:4) menyatakan “studi kebijakan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai *independent variable*, sehingga berusaha mengidentifikasi dampak dari suatu kebijakan publik”.

Berdasarkan pendapat dan perspektif para pakar di atas, dapat dirumuskan suatu definisi konsep kebijakan publik, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan arah tindakan yang merupakan hasil/produk dari proses/aktivitas para aktor politik (pemerintah) dalam suatu sistem politik.
2. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap pemecahan masalah publik.

3. Dalam riset/studi/penelitian dengan fokus kebijakan publik, maka kebijakan publik berfungsi sebagai hipotesis.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka kebijakan publik dapat diartikan sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Menurut Nugroho (2008), ada dua karakteristik dari kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; dan
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Berdasarkan karakteristik yang disebutkan di atas bukan berarti bahwa kebijakan publik juga mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan faktor politik yang esensinya adalah *art of the possibility*.

Nugroho (2008) menyebutkan bahwa terdapat beberapa implikasi dari adanya pengertian tentang kebijakan negara, yaitu:

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan sesuatu.
4. Kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Menurut Bromley (1999) terdapat 3 (tiga) level sehubungan dengan proses perubahan kelembagaan yaitu level kebijakan (*policy level*), level organisasional (*organizational level*), dan level operasional (*operational level*) 1). Dalam suatu negara demokrasi, adanya level kebijakan ini selalu ditandai dengan adanya badan legislatif dan badan hukum, sementara adanya level organisasional ditandai dengan adanya badan eksekutif. Pada level ini, biasanya keputusan-keputusan mengenai tata kehidupan yang diharapkan senantiasa dimusyawarahkan dan dirumuskan. Pada tahap implementasinya, aspirasi semacam ini akan tercapai sejalan dengan perkembangan lembaga dan perkembangan peraturan dari perundang-undangan itu sendiri.

Menurut Iskandar (2003), peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk konkrit dari kebijakan publik. Kebijakan publik seperti peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai barang-barang publik (*public goods*). Adapun ciri peraturan perundang-undangan sebagai *public goods* menurut Sudarsono dalam Iskandar (2003) di antaranya adalah:

“Peraturan perundangan (*rule*) bersifat bertingkat-tingkat sesuai dengan hierarki proses kebijakan. Proses kebijakan pada level kebijakan akan menghasilkan *institutional arrangement* seperti Undang-undang. Undang-undang ini kemudian akan diterjemahkan oleh proses kebijakan pada level organisasi yang akan menghasilkan *institutional arrangement* yang tingkatannya lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), atau Keputusan Menteri (Kepmen). Selanjutnya *institutional arrangements* ini akan diterjemahkan oleh kebijakan di level operasional sehingga mempengaruhi pola hasil instruksi (*pattern of instruction outcome*) dari kebijakan tertentu”.

Berdasarkan gambaran proses kebijakan maka dapat disimpulkan demikian besarnya implikasi level kebijakan terhadap pola interaksi di tingkat bawah. Kebijakan publik sebagai salah satu sumber perubahan atau pembaharuan kelembagaan (*institutional change*) dalam masyarakat (Iskandar, 2003).

Peraturan perundangan (*rule*) sebagai barang publik (*public good*) dipandang sebagai suatu hal yang menyangkut kepentingan publik (*public interest*), walaupun menurut Barzeley jika dipandang dari perspektif kepentingan publik dalam banyak hal pemerintah seringkali gagal mewujudkan hasil yang

diinginkan (Iskandar, 2003). Kondisi demikian menurut Sudarsono disebabkan oleh ciri lain dari *rule* yang sifatnya tidak lengkap (*incompleteness*) yang tidak terlepas dari faktor keterbatasan manusia dalam mengantisipasi masalah di masa yang akan datang. Kondisi seperti itulah yang kemudian mengharuskan *rule* harus terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan (Iskandar, 2003). Apabila *rule* sebagai barang publik sudah dipandang kurang sesuai dengan kepentingan publik, maka sesuai hierarki proses kebijakan di atas maka *rule* harus senantiasa direvisi, diperbaharui, dan diserasikan dengan perkembangan lingkungan. Sesuai tidaknya sesuatu kebijakan publik dalam bentuk *rule* dengan kepentingan publik akan sangat tergantung kepada penilaian hasil masyarakat (*results citizen value*).

Menurut Nugroho (2008), implementasi kebijakan pada prinsipnya cara agar sebuah kebijakan dapat menapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik. Salah satu hambatan adalah birokrasi pemerintahan belum merupakan kesatuan yang efektif, efisien, dan berorientasi kepada tujuan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi kebijakan publik, seharusnya tidak hanya menyoroti perilaku dari lembaga administrasi publik atau benda-benda publik yang bertanggung jawab atas sesuatu program dan pelaksanaannya, namun juga perlu mencermati berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku yang terlibat dalam suatu program dari keluarnya suatu kebijakan publik.

Dari penjelasan mengenai kebijakan dari beberapa ahli di atas, ada tiga kegiatan pokok yang berkaitan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan.

Di dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan. Karena semua kebijakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar kebijakan yang dilakukan berdampak pada apa yang diinginkan

oleh kelompok. Pendekatan yang efektif untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan adalah pendekatan dari bawah ke atas. Target sasaran, pelaksana dan penilai kebijakan adalah orang yang terkena dampak langsung dari suatu kebijakan. Mereka yang lebih mengetahui masalah serta pemecahan masalahnya. Mereka inilah yang akan memberi komitmen bagi suksesnya pelaksanaan kebijakan.

2.5 Implementasi Kebijakan

2.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *and to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). (Webster dalam Wahab, 2006:64). Sedangkan menurut Meter dan Horn (dalam Wahab, 2006:65). Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Purwanto dan Sulistyatuti juga sempat menjelaskan pengertian dari implementasi, mereka mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan, tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto dan Sulistiyawati, 2012:21).

Berbicara keberhasilan suatu kebijakan, Riant Nugroho sempat menyinggung terkait itu, yang mengatakan bahwa sebagai generasi ketiga, implementasi kebijakan memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. (2008:437). Berbeda lagi dengan pengertian dari Suharto

(2008:38), keberhasilan sebuah implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh beberapa instrumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan tindakan tanpa pelaksanaan. Dalam instrumen dengan tindakan paksaan dapat berupa: (1) lisensi, (2) legislasi dan regulasi, (3) petunjuk administrasi, (4) pelaporan, dan (5) pemajakan. Sedangkan instrumen tanpa paksaan berupa: (1) komunikasi, (2) kontak, (3) pengeluaran, (4) pengawasan.

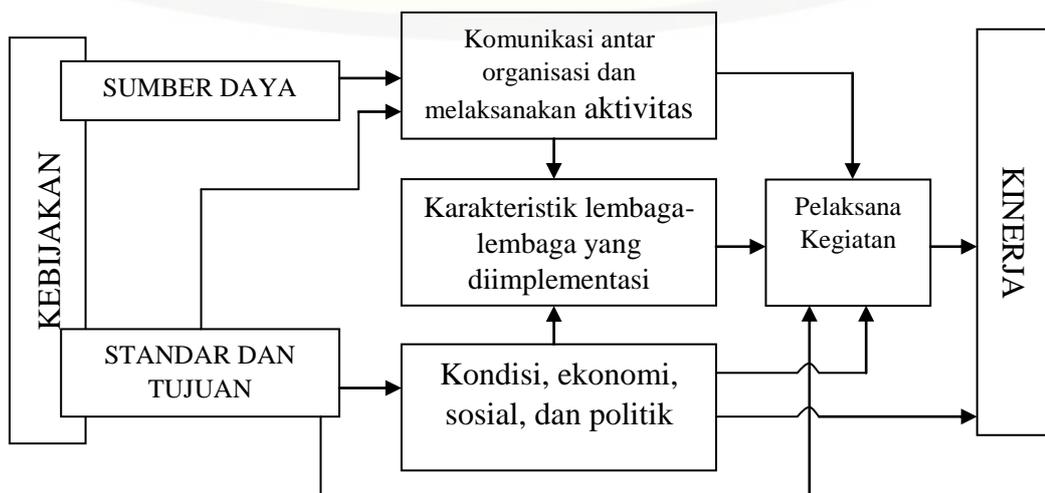
2.5.2 Model-model implementasi kebijakan

Dalam mengkaji sebuah kebijakan publik, kita juga harus paham mengenai model-model implementasi kebijakan. Dengan mempunyai pemahaman mengenai model-model kebijakan publik tersebut, diharapkan dapat membentuk sebuah kerangka berpikir dalam menganalisis sebuah kebijakan publik dengan tepat. Berikut model implementasi kebijakan publik dari Riant Nugroho dalam Public policy, ia menyampaikan beberapa model kebijakan:

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang oalung klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1957). Model ini mengandaikan bahwa implementai kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b. Karakteristik agen pelaksana/implementator
- c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- d. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor.



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang kedua adalah model yang dikembangkan Mazmanian dan Sabatier (1983) yang mengemukakan implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut model kerangka analisis implementasi (a framework for implementation analysis), Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan dalam tiga variabel, yaitu:

- a. Variabel Independen. Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
- b. Variabel Intervening. Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan respons konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- c. Variabel dependen. Yakni tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: Pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Keempat, penerimaan atas hasil nyata. Dan kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersidang mendasar.

3. Model Hogwood dan Gunn

Model ketiga adalah model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/institusi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang andal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

4. Model Grindle

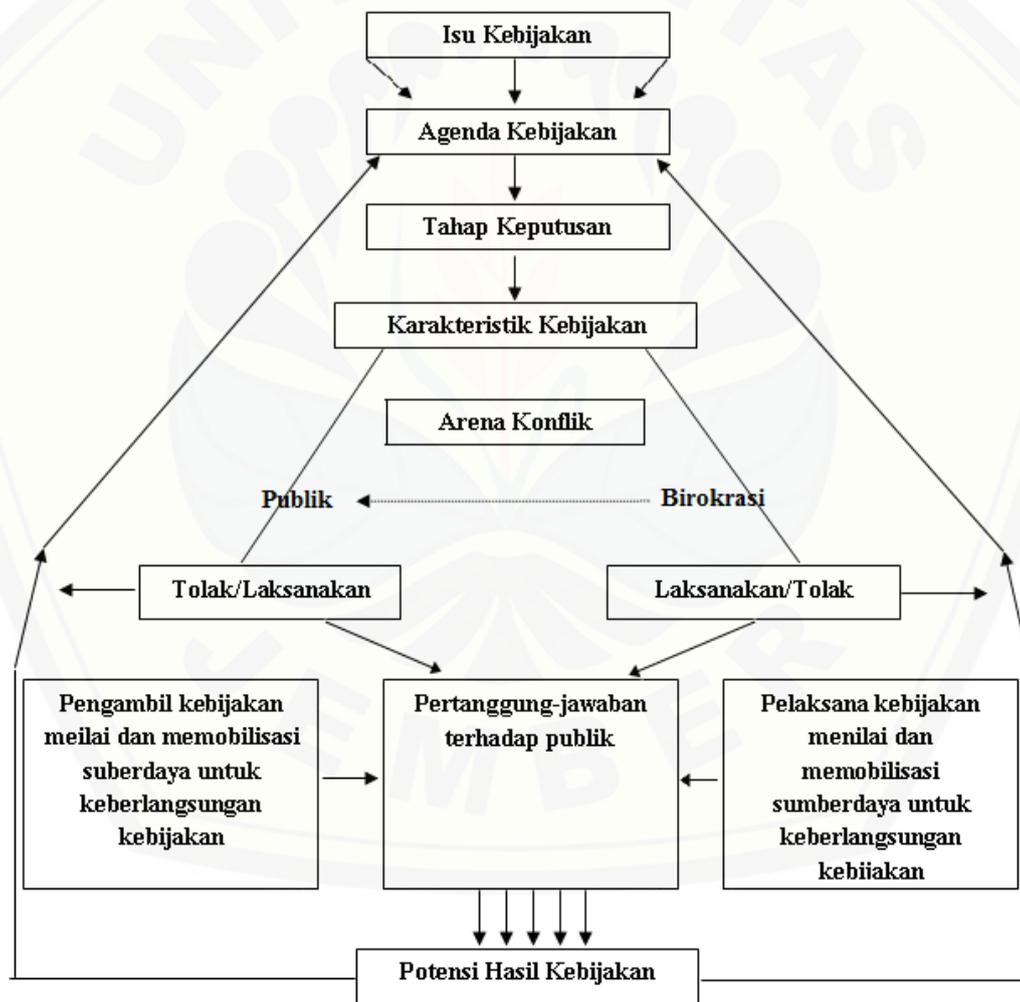
Model keempat adalah model Merilee S. Grindle (1980). Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa, keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh content of policy (isi kebijakan) dan context of implemmentasi (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

- a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan (interest affected)
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit)
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned)
- d. Keudukan pembuat kebijakan (site od decision making)

- e. Para pelaksana program (program implementators)
- f. Sumber daya yang dikerahkan (resources comited)

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

- a. Kekuasaan (power)
- b. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actor involved)
- c. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics)
- d. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness)

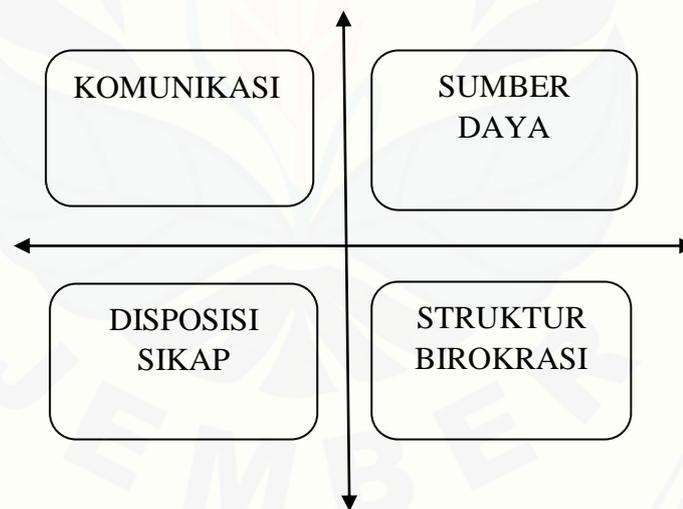


Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Grindle

5. Model Edward

George Edward III (1980,1) mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama: komunikasi, sumber daya, disposisi sikap, dan struktur birokrasi.

Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan ddikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respons dari pihak-pihak yang terlibat. Sumber daya adalah menyangkut ketersediaannya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif. Disposisi adalah tentang komitmen, lebih dari kompetensi dan kapabilitas. Struktur birokrasi adalah dalam hal tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi, karena menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi dari George Edward III dimana ada 4 (empat) factor yaitu komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan struktur birokrasi. Pemilihan model tersebut dikarenakan model Edward III yang dirasa sesuai dengan apa yang ingin peneliti lihat dan teliti, dan model Edward juga merupakan model yang sederhana dan mudah untuk dipahami.

2.6 Konsep Program Keluarga Harapan

2.6.1 Definisi Program Keluarga Harapan

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin Rp. 92.192. (Direktorat jaminan kesejahteraan sosial 2009: 10).

2.6.2 Ketentuan-ketentuan Progran Keluarga Harapan

Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Agar penggunaan bantuan dapat lebih efektif diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang

mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan RTSM penerima pada program-program lainnya. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), dan sebagainya.

Kewajiban penerima PKH adalah sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan kesehatan RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota keluarga terdiri dari anak 0-6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Apabila terdapat anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan. 2) RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 tahun. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial 2009: 3).

2.6.3 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke-1 tentang penyempurnaan pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Korupsi poin lampiran ke- 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebagai peserta program keluarga

harapan (PKH);

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara;
10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial;
11. Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 04/SK/JS/01/2013 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Tahun 2013;
12. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02A/HUK/2008
13. Keputusan Gubernur tentang :Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) provinsi/TKPKD;
14. Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD.
15. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

2.6.4 Sasaran Penerima Bantuan PKH

Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam

buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009.

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan-nyan RTSM pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I , seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin dan BLT (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial 2009: 17).

2.6.5 Besaran Bantuan

Besaran bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH tidak disamaratakan, tidak seperti BLT. Akan tetapi mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Skenario Bantuan PKH

Skenario Bantuan	Bantuan/RTSM/Tahun
Bantuan tetap	Rp. 200.000,-
Bantuan bagi RTSM yang memiliki:	Rp. 800.000,-
d. Anak usia di bawah 6 tahun	
e. Ibu hamil/ menyusui	
f. Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp. 400.000,-
g. Anak peserta pendidikan setara SMP/ MTs	Rp. 800.000,-

Rata-rata bantuan per RTSM	Rp. 1.390.000,-
Bantuan minimum per RTSM	Rp. 600.000,-
Bantuan maksimum per RTSM	Rp. 2.200.000,-

Catatan:

- a. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun dan/ atau ibu hamil/ nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung.
- b. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun.
- c. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun.

Sumber: Buku Pedoman umum PKH

Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar bantuan yang diterima setiap RTSM akan bervariasi. Contoh variasi besar bantuan, baik per tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga. Apabila besar bantuan yang diterima RTSM melebihi batas maksimum yang ditetapkan sebagaimana digambarkan pada contoh 7 tabel 5, maka untuk dapat menjadi peserta PKH seluruh anggota RTSM yang memenuhi persyaratan harus mengikuti ketentuan PKH.

Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-
2. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-
3. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,-
4. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran. (Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial 2009: 17).

2.6.6 Aturan Kebijakan Program Keluarga Harapan

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun

2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan maka ditetapkan:

1. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya :

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

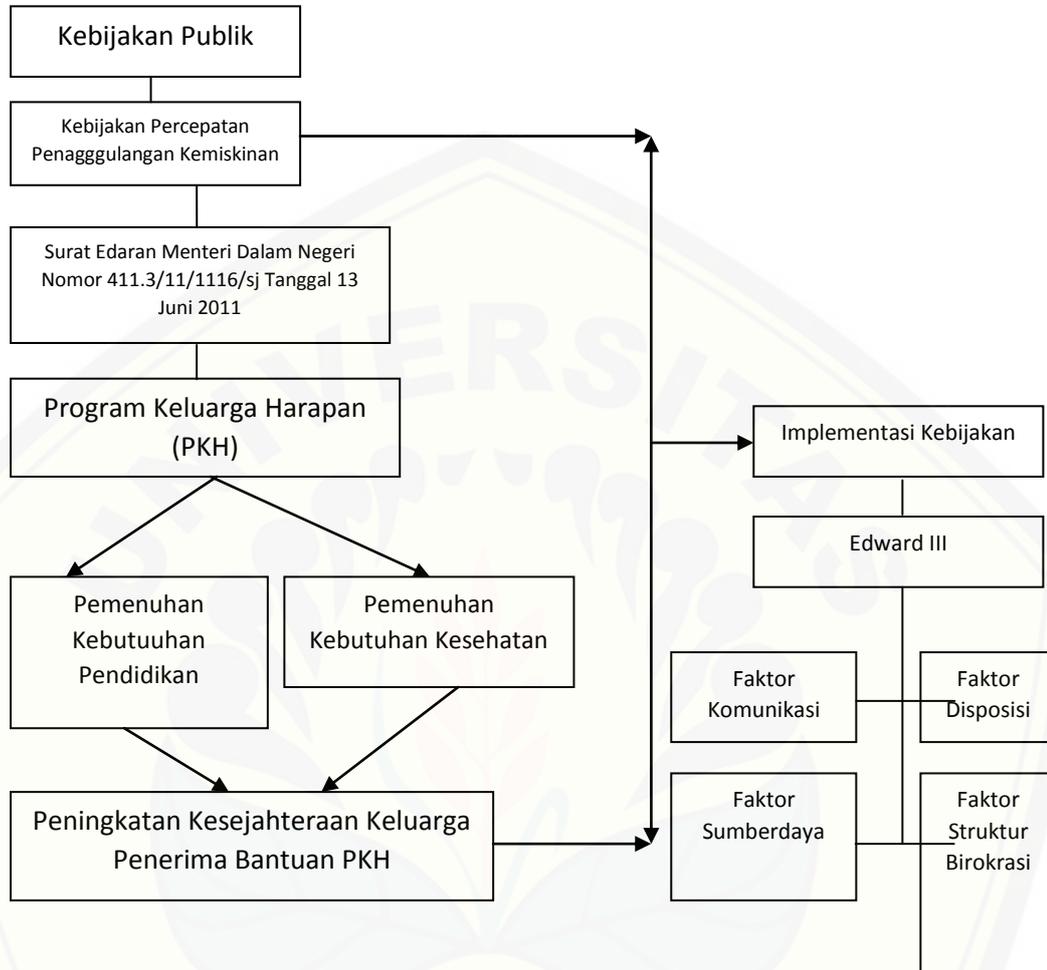
Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Sesuai Instruksi Presiden No.3 tahun 2010, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing, dalam rangka melaksanakan program-program yang berkeadilan yang diantaranya meliputi program :

- a. Program Pro Rakyat. Untuk program pro rakyat memfokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
- b. Program Keadilan untuk semua. Untuk program keadilan untuk semua memfokuskan pada program keadilan bagi anak, program keadilan bagi perempuan, program keadilan di bidang ketenagakerjaan, program keadilan di bidang bantuan hukum, program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan, serta program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.

- c. Pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGs). Untuk program pencapaian tujuan pembangunan millennium, memfokuskan pada program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, program pencapaian pendidikan dasar untuk semua, program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, program penurunan angka kematian anak, program kesehatan ibu, program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, program penjaminan kelestarian lingkungan hidup, serta program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan dibentuk Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi, dan Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota yang disebut TKPK Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, dan TKPK Kabupaten/Kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

2.7 Kerangka Berpikir



BAB III. METODE PENELITIAN

Definisi metode menurut Usaman dan Akbar (2003:42) merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sugiono (2012:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Sementara itu, Sudjana (1991:52) secara lebih teknis menjelaskan bahwa metode merupakan suatu penekanan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang dibutuhkan. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya.

Metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dengan kata lain, hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode ilmiahnya. Jika dianalogikan, objek penelitian yang dikaji ibarat buah, metode penelitian adalah sebuah pisau. Jika peneliti ingin memakan daging buah itu, maka peneliti harus terlebih dahulu mengupas kulit buah dengan pisau yang telah disediakan. Artinya, seorang peneliti dapat mencapai tujuan penelitian atau jawaban atas masalah penelitian, jika peneliti mampu menggunakan metode penelitian yang tepat untuk mengupas masalah-masalah yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti merangum metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian
2. Fokus penelitian
3. Tempat dan waktu penelitian
4. Data dan sumber data
5. Penentuan informan penelitian
6. Teknik dan alat perolehan data
7. Teknik penyajian dan analisis data

8. Teknik menguji keabsahan data.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sebagai salah satu metode penelitian berguna untuk memberi pilihan bagi peneliti dalam menentukan sekian prosedur penelitian yang akan dilakukan. Di dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2016:22), jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali suatu gejala atau fenomena sosial yang memiliki karakteristik tertentu, untuk disampaikan pada khalayak umum sebagai gambaran tentang kondisi yang terjadi di masyarakat. Peneliti berusaha mengungkapkan keadaan tersebut secara natural, penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif.

Moleong (2004:11), menjelaskan bahwa dalam penelitian eksplorasi data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif, dimana menurut Idrus (2009:24) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Bila mengacu pada pengertian yang disampaikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016:59), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedang, jenis kuantitatif, yang juga kerap digunakan apabila tidak memakai kualitatif, adalah musti ditandi dengan penyajian data secara numerik. Selaiknya penelitian, data, fakta, serta informasi, didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bogdan dan Taylor (dalam Sihite, 2007:95) menjelaskan bahwa, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami individu secara personal. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami lebih mendalam apa yang dialami

individu dalam kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan mendapat penjelasan yang valid mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Sa'ud (dalam Ghony dan Alamshur, 2012:13-14) penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data untuk diinterpretasi.

Menurut Norman dan Yvonna (2009:6), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Hal ini berarti dalam penelitian kualitatif lebih menekankan sifat realita yang terbangun secara rasional, hubungan erat antara peneliti dengan subyek yang diteliti, dan dinamika situasilah yang kemudian membentuk penyelidikan. Menurut Norman dan Yvonna (2009:6):

“Para peneliti kualitatif mementingkan sifat penyelidikan yang sarat nilai. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Sebaliknya, penelitian kuantitatif menitikberatkan pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara bermacam-macam variabel, bukannya prosesnya. Penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai.”

Metode kualitatif didasarkan pada filsafat fenomenologis yang lebih mengutamakan penghayatan, sehingga berusaha memahami dan menginterpretasi makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:286), fokus penelitian merukan batasan masalah, sehingga dapat dikatakan bahwa fokus penelitian adalah sebuah batas area permasalahan penelitian. Kemudian dengan adanya batas penelitian itu, dapat menghindarkan peneliti dari pelebaran penelitian atau menghindarkan perolehan

data yang sia-sia karena data yang diperoleh adalah diluar dari bahasan topic penelitian.

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup dari penelitian yang diteliti, sehingga dengan adanya fokus penelitian maka peneliti bisa membatasi permasalahan yang hendak diteliti. Pada penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai pengentasan kemiskinan melalui implementasi Program PKH di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Fokus penelitian ini, difokuskan pada implementasi program PKH sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu dalam sebuah penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam satu kategori fokus yang sama. Menurut buku pedoman karya ilmiah (2016:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan.

Pada penelitian ini, peneliti menentukan Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagai tempat atau lokasi penelitian. Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Belum ada penelitian mengenai implementasi PKH di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
2. Meski jarak antara kantor administrasi kabupaten terbilang dekat, Desa Pancakarya Kecamatan Ajung masih mempunyai banyak orang miskin.
3. Meski terdapat banyak gudang tembakau dan dekat dengan pusat penelitian kopi dan kakao (Puslit Kopi dan Kakao) yang dapat menyerap tenaga kerja, di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung masih banyak warga yang tidak bekerja.
4. Termasuk Kecamatan yang dipilih untuk ditempai pembangunan bandara dan stadion (JSG). Maka, pemerintah sudah seharusnya untuk memperhatikan masyarakat yang ada di sana, terutama soal kesejahteraan.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kemiskinan yang ada di sana.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-Agustus 2018 dengan melihat pelaksanaan program keluarga harapan ini pada tahun 2015.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data lengkap dan jelas. Buku penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2016:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angkata atau deskripsi, dan berasal dari sumber data.

Sedangkan pengertian sumber data dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Jember (2016:23) adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis data yang telah dijabarkan di atas untuk mendukung proses penelitian. Data primer didapatkan oleh peneliti melalui observasi atau pengamatan lapangan secara langsung dan hasil wawancara kepada informan mengenai implementasi program keluarga harapan yang ada di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Data sekunder sebagai salah satu jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian, meliputi data petunjuk pelaksanaan dan teknis program, indeks pembangunan Kabupaten Jember, data penerima PKH di Ajung Kabupaten Jember, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk mendukung proses penelitian ini, seperti: segala aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan implementasi program, baik itu peraturan perundangan-undangan, peraturan menteri, peraturan presiden, serta intruksi presideng terkait penanganan kemiskinan.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Informan dalam metode kualitatif terus berkembang secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap jenuh (hasil tetap). Alat pengumpul data atau instrumen dalam metode ini adalah peneliti sendiri, oleh karena itu peneliti menjadi instrumen kunci, sehingga ketika mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Namun, yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Irawan (2006:17), *Purposive Sampling* adalah *Sample* yang sengaja dipilih oleh peneliti karena *Sample* ini dianggap memiliki ciri-ciri yang dapat memperkaya peneliti. Menurut buku pedoman karya ilmiah Universitas Jember (2010:23). Informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:221), informan peneliti sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturasi, yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- c. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif, bukan berdasarkan subjektivitasnya.
- d. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Dari beberapa kriteria di atas, maka informan dari penelitian ini adalah Pembina Penanggungjawab atas Program PKH di Kabupaten Jember, Operator UPPKH Kabupaten Jember, Untuk lebih mengetahui bagaimana jalannya kegiatan tersebut peneliti juga memilih informan lain yaitu para pendamping PKH di Desa Pancakakrya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Beberapa informan tersebut merupakan informan yang terlibat secara langsung dalam program dan ditetapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti secara obyektif. Pula mengetahui secara detail Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:24), merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Kualitas data tergantung kepada kualitas alat pengukur atau alat pengambil data serta kualifikasi orang yang mengambil data. Data atau informasi dapat diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Peneliti harus menerima menurut apa adanya. Dalam penelitian ini, teknik dan alat perolehan data dalam penelitian adalah:

a. Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57), wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Sugiyono (2011:233), mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semistruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas. Namun, tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Maksud dilakukannya wawancara ini, adalah untuk secara langsung dari kata-kata dan tindakan informan, kemudian data dan hasil wawancara tersebut dicatat.

Menurut Esterberg, jenis wawancara ada tiga yakni sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang

dibutuhkan dan akan diperoleh. Sebelum mengumpulkan data, peneliti telah menyiapkan *instrument* penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

2. Wawancara Semi Terstruktur (*Semistructured Interview*)

Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dengan tujuan dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dan yang diwawancarai dapat mengeluarkan pendapat serta ide-ide secara terbuka.

3. Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Dengan tujuan untuk memperoleh data secara lebih terbuka dengan memintai pendapat dan ide dari pihak yang diwawancarai. Selain itu, agar data yang diperoleh sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Peneliti sebelum melakukan wawancara akan mencatat pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan diajukan saat wawancara, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut akan berkembang selama proses wawancara berlangsung di lapangan atau lokasi penelitian.

b. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Idrus (2009) pada jenis penelitian ini, peneliti akan mendatangi kepada sumber data terkait dengan maksud dan tujuan dalam rangka melakukan penelitian. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pada suatu saat peneliti juga melakukan observasi yang tersamarkan untuk menghindari proses penyimpangan data yang dilakuka secara rahasia oleh sumber data. Alat perolehan data yang digunakan

oleh peneliti dalam melakukan observasi ini adalah kamera atau media rekam lainnya untuk mendokumentasikan hasil observasi peneliti.

Observasi terdiri dari beberapa jenis yang memiliki kriteria kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang dipilih biasanya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Menurut Moleong (2016:24-277), jenis-jenis observasi terdiri dari:

1. Observasi Partisipatif.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dengan obyek yang sedang diteliti. Sehingga data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, sesuai dengan fakta yang ada, dan peneliti dapat mengetahui tingkat makna dan setiap perilaku yang nampak.

2. Observasi Terus Terang atau Tersamar.

Jenis observasi yang ketika peneliti melakukan pengamatan menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa, peneliti sedang melakukan penelitian. Namun, dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi. Hal ini, bertujuan menghindari adanya data yang sedang dicari merupakan data yang sedang disarhasiakan dan jika peneliti terus terang, kemungkinan besar tidak akan memperoleh data yang diinginkan.

3. Observasi Tak Berstruktur.

Dalam sebuah penelitian kualitatif, jenis observasi ini biasanya belum dipersiapkan secara sistematis apa yang akan diobservasi. Karena fokus penelitian ini masih belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama proses observasi sedang berlangsung. Pengamatan yang dilakukan peneliti tidak menggunakan rambu-rambu pengamatan.

Penelitian ini menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar. Memilih observasi ini, karena berhubungan dengan lokasi penelitian. Salah satu lokasi yang akan diteliti adalah lembaga. Dan tidak memungkinkan untuk memperoleh data secara tertulis maupun dokumen-dokumen penting, pula identitas peneliti juga dirahasiakan. Sedangkan penggunaan observasi tersamar dilakukan untuk menghindari penyembunyian data yang dirahasiakan. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, maka peneliti menggunakan model observasi secara tersamarkan atau terus terang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah UU tentang PKH, pedoman pelaksanaan PKH, serta segala aturan yang menyangkut dengan pelaksanaan PKH di Kecamatan Ajung, baik peraturan presiden, intruksi presiden, peraturan menteri dan keputusan-keputusan mengenai pelaksanaan program keluarga harapan. Selain itu, dokumentasi berupa foto, catatan, dan hasil rekaman proses observasi dan wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting pendukung penelitian.

Dengan alasan sebagai kelengkapan dan kesesuaian data, maka peneliti menggunakan dokumentasi. Pemilihan metode ini, karena hal tersebut akan menjadi bukti penegas dalam penelitian.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

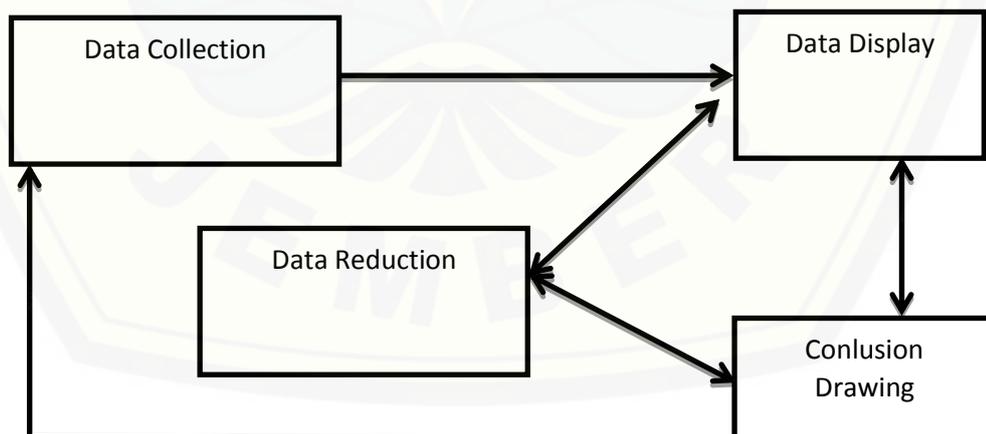
Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku pedoman karya tulis ilmiah Universitas Jember (2010:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah, sehingga mampu menjadi informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Prastowo (2012:237), berbicara tentang teknik penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif, artinya berbicara tentang mengolah dan melakukan analisis data kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman.

Dalam analisa data kualitatif, model interaktif yang digunakan peneliti, merupakan upaya terus-menerus yang mencakup tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara

berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul-menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari hasil lapangan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah berupa teks yang bersifat naratif, gambar, tabel, dan angka.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip dari Idrus (2009:148), model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, analisis data dapat dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut dianalisis secara lebih mendalam, sehingga memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses koding. Tahap analisis data yang terakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Senada dengan pendapat di atas, Miles dan Huberman yang dikutip dari Idrus (2009:148), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1 Proses analisis interaktif.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri atas tiga sub proses yang saling terkait, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data*

display), pengambilan kesimpulan/verifikasi. Menurut Denzim dan Lincoln (2009:592), menjelaskan bahwa proses ini dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, tepatnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan penelitian, sewaktu proses pengumpulan data sementara dan analisis awal, serta setelah tahap pengumpulan data akhir. Ada pun penjabaran dari analisis interaktif, sebagai berikut:

a. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data berarti, bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data dilakukan penyederhanaan. Hal ini, dilakukan ketika peneliti menentukan kerangka kerja konseptual (*conceptual framewok*), pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang digunakan. Jika hasil catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean, merumuskan tema-tema, pengelompokkan, dan penyajian cerita secara tertulis. Dengan kata lain, proses reduksi data berjalan selama pengumpulan data berlangsung dilakukan secara terus-menerus sejalan dengan penelitian berlangsung, bahkan proses ini terjadi setelah penelitian lapangan terakhir dan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Proses reduksi data ini, dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

b. Data *display* (penyajian data)

Data *display* (penyajian data), merupakan konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data merupakan bagian kedua dalam tahap analisis. Penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi yang tersusun pemberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Seorang peneliti perlu mengkaji proses reduksi data sebagai dasar pemaknaan. Dengan mencermati kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Penyajian

data yang lebih terfokus pada meliputi ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, matriks dengan teks daripada angka.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data model interaktif, menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Selanjutnya, peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi penetapan makna dari data yang terurai. Cara yang dapat digunakan akan semakin banyak, seperti metode komparasi, merumuskan pola dan tema, pengelompokan, metode triangulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan.

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji keabsahan data menjadi sangat penting agar temuan hasil penelitian yang didapat oleh seorang peneliti dapat dipercaya atau diakui validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian dapat dikatakan valid jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Untuk itu, dirasa sangat perlu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian.

Dalam melakukan pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk teknik pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda, yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data dengan melakukan *cross check* data, misal, peneliti telah mendapatkan data menggunakan teknik wawancara dengan salah satu informan, kemudian data yang diperoleh dari informan akan dilakukan pengecekan ulang dengan data lain. Dengan

menggunakan dokumen, atau wawancara dengan informan, dan lain-lain, misalnya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

Dalam penelitian, proses cross check disebut triangulasi, merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, menggunakan triangulasi dari sumber informan, triangulasi dari teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Satori dan Komariah, 2014:56). Sedangkan menurut Sugiyono (2008:273), triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Bila mengacu pada pengertian tersebut, maka triangulasi dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Cara meningkatkan kepercayaan peneliti dengan menggunakan data dari berbagai sumber yang beragam dan saling terkait satu sama lain. Peneliti musti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Waktu

Dengan menggunakan triangulasi waktu, peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman, dan ketepatan / kebenaran suatu data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

3. Triangulasi Teknik

Penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik, yaitu data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan karena peneliti ingin fokus pada data yang diperoleh dengan membandingkan data dari sumber satu dengan sumber lainnya. Dalam hal ini, perbandingan dilakukan antar informan pokok dengan pokok, pokok dengan tambahan, serta tambahan dengan tambahan. Hingga kemudian hasilnya dikumpulkan menjadi satu sebagai hasil akhir dari penelitian secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Yakni dengan memverifikasi dari berbagai narasumber yang ditentukan. Karena hal tersebut akan menjadi bukti bahwa penelitian valid dan bisa dibuktikan kebenarannya.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengenai pengetahuan dan sosialisasi Program PKH yang dilakukan oleh petugas/pendamping di PKH desa Pancakarya , hanya dilakukan antara penerima dan petugasnya saja. Sementara sosialisasi yang dilakukan kepada tokoh masyarakat dan masyarakat luas tidak dilakukan dengan baik. Dengan pejabat desa dan pejabat RT juga tidak dilakukan dengan baik. Sehingga stakeholders pendukung program PKH belum mendukung sepenuhnya.
2. Proses pendataan dalam menentukan peserta penerima PKH di desa Pancakarya sudah dilakukan dengan prosedur dan ketentuan program PKH. Meski demikian masih banyak masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima Program PKH, tetapi belum mendapatkan. Jika melihat hal ini artinya pemutakhiran data perlu dilakukan dengan benar sehingga peserta yang harus mendapatkan sesuai dengan target tujuan program PKH yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping atau petugas tidak dilakukan dengan baik. Proses pendampingan tidak dilakukan kunjungan kerumah peserta PKH sebagai upaya memastikan perkembangan dari target tujuan
4. Proses pendistribusian dana PKH kepada penerima atau RTSM dilakukan oleh petugas PKH dengan dibagikan di kantor desa . Dana yang di terima oleh peserta PKH kerap digunakan untuk keperluan lain diluar ketentuan PKH.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang direkomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk pengembangan pengayaan teori maupun kebutuhan praktisi guna mendukung program PKH khususnya di desa Pancakarya adalah sebagai berikut :

1. Tim pelaksana PKH di desa Pancakarya menggalakan sosialisasi Program PKH tidak hanya kepada peserta PKH tetapi juga kepada pihak-pihak lain pejabat kecamatan, perangkat desa, RT/RW dan warga masyarakat secara luas sehingga proram PKH mendapat dukungan masyarakat secara massif.
2. Perlu dilakukan pemutakhiran data secara benar dengan bentuk proses pendataan peserta penerima PKH di desa Pancakarya. Hal tersebut untuk mengurangi masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima Program PKH tetapi belum mendapatkan.
3. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang profesional.
4. Tim pendamping atau petugas perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH.

DAFTAR PUSAKA

- Dunn, William N., 1999 *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo
- Keban, Y.T 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. PT.Gava Media. Yogyakarta
- Kontour, Ronny. 2003. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Muchsin, dan Fadillah, P. 202. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertai dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Nugroho, Riant. 2003. *KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi , Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant,. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia
- Prastowo, Andi. 2012 *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensial*. JMPK Vol . 08/No.03/September/2005
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Jember University Press
- Usman, H.&Akbar, P.S 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Perundang-Undangan

Peraturan Presiden (Perpre) No. 15 th 2010

Intruksi Presiden (Impres) No. 3 Tahun 2010

Pedoman Wawancara

Peserta PKH

Nama :

Usia :

Alamat :

Pendidikan terakhir :

1. Sejak kapan anda menjadi peserta PKH ?
2. Darimana anda mengetahui PKH
3. Bagaimana sosialisasi yang diberikan pendamping
4. Kegiatan apa yang dilakukan dalam pelaksanaan PKH ?
5. Apakah anda sering hadir dalam dalam kegiatan PKH ?
6. Untuk keperluan apa uang dari PKH ?
7. Apa manfaat yang di dapat dari PKH ?

Dokumentasi

